

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa di mana kita diharuskan hidup berdampingan dengan virus yang cukup lama melanda di hampir seluruh negara di dunia, yaitu Covid-19. Guna mencapai tujuan hidup berdampingan tersebut salah satunya, yaitu mengurangi transaksi yang semula menggunakan uang kertas beralih menggunakan alat pembayaran *cashless* agar tidak terjadi perpindahan virus melalui sentuhan fisik. Hal ini yang menjadikan peran uang persediaan dengan sumber dana kartu kredit pemerintah semakin penting dalam transaksi sehari-hari yang dilakukan satker dan lembaga lainnya.

Uang persediaan (UP) tunai adalah UP yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam bentuk uang tunai melalui rekening bendahara pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Uang persediaan kartu kredit pemerintah (UP KKP) adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah guna membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang

sumber dananya berasal dari rupiah murni. Penggunaan KKP dalam kegiatan operasional sehari-hari selain meminimalkan risiko penularan virus dapat pula mempermudah transaksi.

Kartu kredit pemerintah diberlakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara tunai dan mengurangi *cost of fund/idle cash* dari penggunaan uang persediaan (PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah). Atas dasar inilah kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas penggunaan sistem pembayaran *non tunai* berupa kartu kredit pemerintah menjadi suatu kebutuhan transaksi satker serta dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan tinjauan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dilihat dari realisasi UP di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Wilayah Pembayaran KPPN Balikpapan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir adalah:

1. Bagaimana efektivitas dari penggunaan KKP pada transaksi operasional satker di lingkungan kerja KPPN Balikpapan.

2. Apa saja yang menjadi tantangan/permasalahan dalam proses mencapai realisasi UP Tunai dan KKP yang ideal.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara teori maupun praktik terkait efektivitas UP KKP di KPPN Balikpapan.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan dan kendala yang muncul dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Balikpapan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Fokus pembahasan pada KTTA ini adalah efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dilihat berdasarkan data realisasi UP Tunai dan UP KKP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan pada tahun 2020 dan 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengetahui implementasi dari pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi dalam bidang penatausahaan pembukuan bendahara khususnya pada efektivitas penggunaan KKP di KPPN Balikpapan. Serta dapat dijadikan sarana pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bentuk penerapan teori perkuliahan yang telah dipelajari.

2. Bagi Akademik

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

3. Bagi Pembaca

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan informasi mengenai efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah pembayaran KPPN Balikpapan dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan bijaksana dan sebaik-baiknya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Halaman Judul

Halaman Persetujuan Karya Tulis Tugas Akhir

Halaman Pernyataan Lulus Dari Tim Penilai Karya Tulis Tugas Akhir

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tugas Akhir

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Ruang Lingkup Pembahasan
- 1.5 Manfaat Penulisan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Konsep Dasar Efektivitas
- 2.2 Konsep Dasar UP Tunai
- 2.3 Konsep Dasar UP Kartu Kredit Pemerintah
- 2.4 Mekanisme Penggunaan UP Tunai dan UP KKP

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Metode Pengumpulan Data
 - 3.1.1 Observasi
 - 3.1.2 Wawancara
 - 3.1.3 Data Sekunder
- 3.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan
 - 3.2.1 Visi, Misi, dan Tupoksi KPPN Balikpapan
 - 3.2.2 Struktur Organisasi KPPN Balikpapan
 - 3.2.3 Sejarah KPPN Balikpapan
- 3.3 Pembahasan Hasil
 - 3.3.1 Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker di wilayah pembayaran KPPN Balikpapan

- 3.3.2 Penggunaan KKP oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN
Balikpapan
- 3.3.3 Realisasi Anggaran Pemakaian UP KKP
- 3.3.4 Tinjauan Efektivitas KKP di wilayah pembayaran KPPN
Balikpapan Tahun 2020-2021

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS